

Manajemen Pembiayaan Di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan

Muhammad Indillah¹, Yetri², & Amirudin³

muhindillah1512@gmail.com¹, yeti.hasan@radenintan.ac.id², amirudin@radenintan.ac.id³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹²³

Abstrak: Manajemen pembiayaan sekolah merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendaya gunakan seluruh dana di sekolah. Mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber keuangan. Berdasarkan hasil survey penulis dapat mengidentifikasi masalah yang antara lain: perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*) dan pemeriksaan (*auditing*) belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari kepala Madrasah, Ketua Komite, TU, bendahara, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru-guru. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Dengan implementasi manajemen pembiayaan melalui fungsi- fungsi manajemen keuangan yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), pemeriksaan (*auditing*). Implementasi manajemen pembiayaan melalui fungsi-fungsi manajemen keuangan di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan keuangan (*budgeting*) agar dapat menambah jumlah sarana prasarana pendidikan berupa gedung kantor/belajar dan inventaris.

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Budgeting, Accounting, Auditing

Abstract: *School financing management is the whole process of trying to obtain and utilize all funds in schools. Seek as many financial sources and sources as possible to obtain funds from financial sources. Based on the results of the survey, the authors were able to identify problems which included: financial planning (budgeting), implementation (accounting) and auditing (auditing) had not been carried out properly. This study uses a qualitative method. Sources of data in this study consisted of the head of the Madrasah, Chair of the Committee, TU, treasurer, Deputy Head of Curriculum, Deputy Head of Student Affairs, teachers. Collecting data in this study using interview techniques, observation and documentation. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions which were then described descriptively. By implementing financing management through financial management functions, namely financial planning (budgeting), implementation (accounting), inspection (auditing). The implementation of financing management through financial management functions at MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar has been running as it should. Through this research, the authors recommend that parties related to financial planning (budgeting) be able to increase the number of educational infrastructure in the form of office/study buildings and inventory.*

Keywords: *Cost Management, Budgeting, Accounting, Auditing*

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu segi penopang kehidupan yang penting. Perhatian terhadap pendidikan sangat diutamakan dalam kehidupan, namun bukanlah hal yang mudah bagi seseorang

atau lembaga untuk melaksanakan pendidikan. Dunia pendidikan merupakan tempat yang penuh dengan lika-liku permasalahan terutama dalam hal biaya pendidikan. Akan tetapi yang paling inti di dalamnya adalah manajemennya.

Keberhasilan manajemen akan menjadi barometer keberhasilan pendidikan sendiri. Secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah Islamiyah. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya.

Dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara, manajemen merupakan upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan yang merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia sudah semestinya mendapat perhatian penting dalam hal manajemennya. Pendidikan yang baik merupakan tolak ukur bagi sebuah bangsa dan negara dalam hal kemajuan yang dicapai, tidak terkecuali dalam pendidikan Islam.

Manajemen yang baik adalah manajemen yang mempunyai konsep dan sesuai dengan objek serta tempat organisasinya. Proses manajemen merupakan aktivitas yang melingkar, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai dengan pengawasan. Manajemen dalam pendidikan itu sangat penting, terutama dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam harus mampu menciptakan bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengelola lembaga pendidikan Islam harus mampu memanfaatkan setiap sumber yang tersedia sesuai dengan perencanaannya.

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam

tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik (Fatah, 2004).

Sedangkan istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari *School Based Management*. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dari pada itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik pada masyarakat maupun pemerintah (Mulyasa, 2004).

Mulyasa berpendapat: manajemen pendidikan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Konsep tersebut berlaku disekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan,

mengawas, Mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta fasilitas untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Selama ini ada kesan bahwa keuangan adalah segalanya dalam memajukan lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manager lembaga pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Sebab mereka berfikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali uang. Upaya memajukan komponen-komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang seakan pasti mandek ditengah jalan. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan, yaitu: *pertama*, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. *Kedua*, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya pada lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri (Komar, 2007).

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu: 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun keduanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. 2) Orang tua atau peserta didik. 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Komar, 2007), usaha-usaha yang dibentuk oleh sekolah atau yayasan.

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen yang lain. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan perlu dialokasikan dana khusus yang antara lain untuk keperluan: 1). Kegiatan identifikasi input siswa. 2). Modifikasi kurikulum, 3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, 4) Pengadaan sarana dan prasarana, 5)

Pemberdayaan peran serta masyarakat, 6) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Aedi. 2015). Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan antara tugas dan fungsi antara lain: otorisator, ordonator, dan bendaharawan (Komar, 2007).

Menurut Fatah (2002), biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Mulyono (dalam Fauzan, 2016), mengatakan secara lebih luas bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, Administrasi keuangan sekolah adalah sebuah analisis pengelolaan terhadap sumber dana yang diperoleh oleh sekolah yang bersangkutan, perencanaan keuangan, pengelokasian keuangan dan pengawasan keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yang lebih khususnya adalah tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Jika dilihat dari antusias masyarakat tentang sekolah, khususnya di MTs Bahrul Ulum ini, keinginan masyarakat atau orang tua sangat tinggi untuk memasukkan putra dan putrinya untuk dapat bersekolah di sini, karena di Madrasah ini selain mempelajari pelajaran umum juga mempelajari ilmu-ilmu yang bernuansa

Islamiyah misalnya ilmu kitab, tauhit, tahfiz, tilawatil quran dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang bernuansa Islamiyah inilah yang merupakan nilai lebih atau nilai jual karena di sekolah umum tidak didapatkan/sangat minim. Pada zaman sekarang ini sangat banyak bermunculan sekolah-sekolah dasar yang bernuansa Islami. Ini merupakan daya saing yang kuat terhadap sekolah-sekolah swasta.

MTs Bahrul Ulum yang berdiri sejak tahun 2010 ini terhitung berusia masih sangat muda tapi peminat masyarakat begitu besar terhadap sekolah tersebut, MTs Bahrul Ulum ini masih tergabung kedalam Yayasan Sosial dan Pendidikan Bahrul Ulum. Akan tetapi manajemen sekolah tersebut terpisah sendiri dari sekolah dan pondok pesantren yang ada di MTs Bahrul Ulum tersebut.

Bersamaan dengan perkembangannya MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan selain dari pelajaran-pelajaran Ilmu keislamannya, siswa juga diberi bekal pelajaran-pelajaran Non Akademik dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Selain dari pada bidang ekstrakurikuler, siswa yang tinggal dilingkungan Pondok Pesantren juga diberi kegiatan yang bermanfaat seperti mengelola bidang usaha yang ada di dilingkungan pondok pesantren.

Bidang usaha tersebut merupakan penunjang yang sangat besar terhadap Kemajuan Pendidikan di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari natar Lampung Selatan. Selain dari semua itu faktor penunjang pendidikan yang sangat penting adalah didukung oleh lingkungan yang strategis, sarana dan prasarana yang memadai, agar terciptanya kondisi belajar yang nyaman dan kondusif dan menyenangkan.

Adapun implikasi dari bidang-bidang usaha MTs Bahrul Ulum terhadap peserta didik ialah sangat membantu dalam keberlangsungan terhadap proses belajar mengajar, selain dari pada itu penghasilan

dari bidang usaha tersebut dialokasikan untuk siswa-siswa yang kurang mampu dengan program biasiswa setiap tahun.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan komponen produksi yang menentu terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar bersama komponen lainnya di sekolah (Mulyasa, 2007). Sangat penting dan mendapat perhatian dan perlu yang lebih serius dari berbagai komponen masyarakat secara luas, mengingat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari apa yang dinamakan dana atau biaya (Supriadi, 2004).

Anggaran penerimaan merupakan pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid dan masyarakat baik yang mengikat maupun tidak, sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan tiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan di sekolah. Pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam berbagai item pengeluaran yaitu pengeluaran rutin yaitu gaji/ kesejahteraan guru/ pegawai dan biaya operasional sehari-hari sekolah serta pengeluaran pengembangan sekolah.

Beberapa item pengeluaran mencakup: (1) pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2) pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3) pengeluaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (4) pengeluaran kesejahteraan pegawai, (5) pengeluaran administrasi, (6) pengeluaran teknis edukatif dan (7) pengeluaran pendataan (Fatah, 2007).

Manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai pengaturan penerimaan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (Fatah, 2007). Unsur manajemen pembiayaan

meliputi pembiayaan di sekolah itu sendiri yang antara lain: 1) Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi. 2) Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana. 3) Biaya penyelenggaraan pendidikan. 4) Biaya keperluan dan pengembangan (Umar, 2006).

Dengan demikian manajemen keuangan mengkaji bagaimana mengatur penerimaan dan pembiayaan pendidikan, sehingga dapat ditingkatkan serta diperoleh secara setabil, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan dalam kondisi siap dan tidak mengalami masalah serta bagaimana dengan biaya yang ada tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis sekolah secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah/sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah/sekolah, manajemen pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah/sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah/sekolah tersebut, dan mengapa prosedur tersebut dilakukan, maka perlu adanya pengkajian khusus.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah/sekolah mencakup lima kegiatan pokok, yaitu: (1). Perencanaan, (2). Pelaksanaan, (3). Penilaian. Manajemen pembiayaan merupakan sebagai tindakan

pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pertanggung jawaban. Adapun fungsi manajemen pembiayaan yang diterapkan di yayasan Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang pembiayaan pendidikan yang terjadi di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan, yang terfokus kepada sistem perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan anggaran (*akunting*), penilaian (*auditing*). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada (Mardalis, 1999). Salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2018). Dalam penelitian teknik yang digunakan dalam pengambilan sumber data yaitu: *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dalam pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, display data atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara inferensial (Nasution, 2011).

Pembahasan

Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi tentang Implementasi Manajemen Pembiayaan di MTs Bahrul Ulum sebagai berikut:

Perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan

Dalam kegiatan manajemen, perencanaan berarti keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses menyusun anggaran belanja madrasah bagi orang yang mengetahui semua unsur organisasi. Keberhasilan perencanaan sangat menunjang keberhasilan kegiatan manajemen secara keseluruhan. Secara sederhana planning (perencanaan) berarti merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Menurut Kamal Muhammad dalam Husnul Yaqin, perencanaan adalah suatu pemikiran yang mantap terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan, agar bentuk dan tahapan pelaksanaannya dapat berjalan menurut garis yang telah ditentukan dengan jelas, baik sasaran maupun caranya (Yaqin, 2011).

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) Tahun Pelajaran 2020/2021 yang telah dirumuskan oleh pihak Madrasah dengan pihak Yayasan dan Komite, nampaknya telah memenuhi tuntutan pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XV Bagian Ketiga Pasal 56 ayat 1 dan 3 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah yang berbunyi: Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Komite Sekolah/ Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan

pada tingkat satuan pendidikan (UU No 20 Tahun 2003).

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktekkan oleh MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan di bawah pimpinan kepala Madrasah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai pihak yang kemudian dikaji dan pada akhirnya nanti disusun terlebih dahulu sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) pada saat rapat dengan pihak yayasan dan komite.

Perencanaan pembiayaan di Madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RAPBM yang disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 48: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public.

MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan dalam menyusun rencana anggaran dan belanja Madrasah (RAPBM) pada prakteknya selalu dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri kepala Madrasah, guru, yayasan, dan komite. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Manajemen demokratis bermakna bahwa, semua harus dimusyawarahkan bersama semua yang terlibat, seperti siswa, orang tua, yayasan dan lain sebagainya, mereka

harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya (Sulistyorini, 2009).

Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Harjanto (dalam Baihaqi. Dkk, 2012) bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu). Sementara itu proses penyusunan perencanaan pembiayaan, Madrasah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam perencanaan pembiayaan Madrasah sebagaimana yang diungkapkan Mulyasa (2007) bahwa dalam perencanaan pembiayaan Madrasah mencakup dua kegiatan yaitu penyusunan dan pengembangan RAPBS.

Pelaksanaan perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh bendahara komite dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Fattah bahwa anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam manajemen organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana (Fatah, 2007). Akan tetapi dalam pelaksanaan musyawarah, kepala Madrasah dan para wakilnya belum melakukan perencanaan secara maksimal. Manajemen perencanaan itu dibuat orang yang memahami organisasi, perencanaan yang didasarkan pada kenyataannya tauntuk masakini dan masa depan serta dilakukan secara rinci dan teliti. Dalam pelaksanaannya manajemen perencanaan itu harus dibuat secara sederhana, luwes, dan priktis dan dibuat secara bersama untuk direkomendasikan pada pimpinan tertinggi (Bafadal, 2006).

Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan

Dalam prosesnya melakukan ber

bagai perundingan mengenai hasil dari RAPBM. Sebelumnya RAPBM dibuat oleh pihak Madrasah dengan membuat rancangan kebutuhan-kebutuhan program yang telah dibuat dan juga program yang membutuhkan tambahan biaya. Dalam realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua masih tergabungkan dengan biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah (BOS). Secara garis besarnya realisasi anggaran pembiayaan pendidikan di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan melakukan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan terhadap dana pendidikan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulistyorini yang menyatakan bahwa pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaan yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (Sulistyorini, 2009).

Adapun pada Proses Pelaksanaan pembiayaan di MTs Bahrul Ulum. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan keuangan sekolah baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran selalu dilakukan pembukuan untuk menghindari terjadinya salah tulis, atau salah paham di kemudian hari karena bendahara lupa mencatat transaksi yang telah terjadi. Bentuk-bentuk pembukuan atau pencatatan keuangan yang digunakan di MTs Bahrul Ulum meliputi: (1) Buku Kas Umum, (2) Buku Kas Pembantu, (3) Buku Pembantu Bank, (4) Buku Penerimaan Gaji, (5) Laporan Keuangan, (6) Faktur, dan (7) Buku Tabungan.

Format buku kas umum yang digunakan oleh MTs Bahrul Ulum memuat tanggal, no. kode, no. bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Fungsi buku kas umum adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap hari,

selain itu juga memuat saldo setiap akhir bulannya. Buku kas umum ini dicatat dan dilaporkan setiap bulan nya kepada kepala madrasah. Melalui buku kas umum ini kepala madrasah dapat mengetahui berapa penerimaan dan pengeluaran madrasah.

Buku pembantu kas di MTs Bahrul Ulum ini dimaksudkan untuk membantu pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Sama halnya dengan buku kas umum tapi dalam buku pembantu kas ini lebih berfungsi untuk membantu pencatatan sebelum dipindahkan ke buku kas umum. Dalam buku pembantu kas terdapat kolom debit untuk saldo penerimaan dan kolom kredit untuk pengeluaran. Buku pembantu kas ini biasanya digunakan pada saat dana BOS belum diterima oleh madrasah.

Buku penerimaan gaji di MTs Bahrul Ulum dibuat untuk mencatat gaji para guru dan karyawan yang telah dibayarkan. Gaji para guru dan karyawan ini diberikan setiap satu bulan sekali. Setiap guru dan karyawan menerima gaji sesuai dengan beban kerja yang dibebankan kepada guru dan karyawan tersebut. Guru dan karyawan diharuskan memberikan tanda tangan rangkap dua sebagai bukti bahwa guru atau karyawan tersebut telah menerima gaji pada setiap bulannya.

Pelaksanaan Pembiayaan pendidikan secara umum bertujuan untuk pemeratakan pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Strategi pengalokasian pembiayaan pendidikan guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana tersebut. Pendekatan efisiensi ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, prinsip ini dikenal sebagai prinsip dasar dalam manajemen dalam pembiayaan sekolah ketika terjadi keterbatasan dalam sumberdaya yang ada mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Penggunaan anggaran

memperhatikan azas umum pengeluaran Madrasah, yaitu pemanfaatan penggunaan uang Madrasah minimal harus sama, apabila uang tersebut dipergunakan oleh pengelola madrasah.

Adapun temuan dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pembukuan Pembiayaan yang bersumber dari orang tua siswa maupun Pemerintah di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 bahwa pelaksanaannya pihak komite bertugas sebagai pengatur apabila ada uang yang masuk baik dari siswa, serta bertugas mengatur pengeluaran untuk dialokasikan kepada masing-masing bidang pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam program kegiatan di RAPBM.

Penilaian/Pengawasan Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan

Dalam sebuah manajemen manajemen tidak akan pernah lepas dengan pengawasan atau yang kita kenal dengan *controlling*. Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Abduraahman (dalam Yaqin, 2011) bahwa pengawasan merupakan kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara memberikan kesimpulan bahwa salah satu poin penting dalam kegiatan pengawasan adalah melakukan Audit internal, yang dilakukan bersama-sama oleh Kepala sekolah dan Wakil Kepala sekolah beserta seluruh

Staf terkait. Dengan memverifikasi catatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara komite. Peran pengawasan bukanlah mendeskreditkan bagi pelaksana dalam hal ini bendahara komite, akan tetapi pengawasan ini dilakukan demi kesesuaian realisasi yang direncanakan, sehingga pengelolaan pembiayaan yang baik yang bersumber dari pemerintah terlebih lagi dari orang tua di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Hasil temuan yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Pengawasan Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan dari orang tua siswa diketahui bahwa laporan pertanggung-jawaban penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah dan dari orang tua siswa di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021 dibuat oleh bendahara komite berbentuk neraca (bukukas) yang mengacu pada catatan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal ini bukti kwitansi pengeluaran dana yang tidak terduga.

Kemudian Bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh bendahara komite MTs Bahrul Ulum Natar yang dilaporkan kepada tim Audit internal yaitu Kepala madrasah MTs Bahrul Ulum Natar. Tim audit Eksternal yakni Pihak Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Bahrul Ulum dan Tim Audit lainnya yaitu pemerintah atau dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat.

Selanjutnya Bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh bendahara komite MTs Bahrul Ulum Natar menurut peneliti harus memenuhi standar laporan pertanggungjawaban yang komprehensif. Sebab kriteria laporan pertanggungjawaban yang baik seharusnya mampu memberikan informasi pelaksana-

an pembiayaan pendidikan, dari segi arus kas keuangan madrasah, perkembangan kegiatan, problem dan kesenjangan dalam kegiatan, dan alternative pemecahan masalah. Sehingga laporan tersebut mampu memberikan gambaran bagi pimpinan untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan. Hal ini mengacu pada pendapat Matin (dalam Sonedi dkk, 2017) bahwa laporan keuangan harus mampu menginformasikan kemajuan, perkembangan atau realisasi fisik baik ruin maupun pembangunan dalam suatu periode tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Bahrul Ulum Krawang Sari Natar Lampung Selatan sudah dibuat melalui perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak madrasah sebelum dilaksanakan rapat bersama yayasan, komite sekolah dan orang tua, walaupun rancangan anggaran yang dibuat dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya dalam Pelaksanaan anggaran dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Bahrul Ulum Natar Tahun Pelajaran 20120/2021 di lapangan menunjukkan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan RAPBM yang dibuat, dalam arti anggaran telah dibuat pembukuannya/*accounting*. Pengawasan pembiayaan di MTs Bahrul Ulum dilakukan secara langsung oleh Kepala Madrasah. Pengawasan penggunaan pembiayaan di MTs Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2020/2021 dibuat dalam bentuk rekapitulasi realisasi secara global, walaupun pembuatan laporan oleh bendahara mengacu pada catatan pengeluaran yang dibuat sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal bukti catatan pengeluaran dana tidak terduga. Secara

sederhana audit pembiayaan ini dengan dua sistem yakni internal dan eksternal.

Daftar Pustaka

- Aedi, N. (2015). *Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Gosyen publishing.
- Bafadal, I. (2006). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Cet II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baihaqi., Usman, N., & Zahri, C. (2012). Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 29-44.
- Fatah, N. (2007). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bai Quraisy.
- Fatah, N. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan* (Cet. 7). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatah, N. (2002). *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fauzan. (2016). *Pengantar Sitem Administrasi Pendidikan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Komar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Erlangga.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sonedi., Jamalie, Z., & Majeri. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat: Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya. *Fenomena*, 9(1), 25-46.
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras.
- Supriadi, D. (2004). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah, Rujukan Bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar, H. (2006). *Riset Sumber Daya Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yaqin, H. (2011). *Kapita Selekta Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Cet.II. Banjarmasin: Antasari Press.